

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BANK
INDONESIA NO. 18/41/PBI/2016 TERHADAP PENCAIRAN
BILYET GIRO MELALUI PERANTARA DI UD. ALFIAN JAYA
DESA WEDORO KECAMATAN WARU KABUPATEN
SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh

Fatwa Putri Ratningsih

NIM. C92215156



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatwa Putri Ratningsih
NIM : C92215156
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank
Indonesia No. 18/41/PBI/2016 terhadap
Pencairan Bilyet Giro Melalui Perantara di UD.
Alfian Jaya Desa Wedoro Kecamatan Waru
Kabupaten Sidoarjo.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Fatwa Putri Ratningsih

NIM. C92215156

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fatwa Putri Ratningsih NIM. C92215156 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Januari 2019.

Pembimbing



Muh. Sholihuddin, M.HI

NIP. 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fatwa Putri Ratningsih NIM. C92215156 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 06 Februari 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

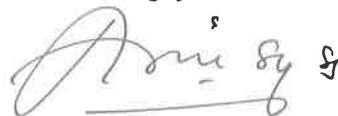
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 197707252008011009

Penguji II,



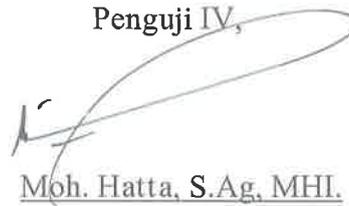
Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
NIP. 197106052008011026

Penguji III,



Suyikno, S.Ag, MHI.
NIP. 197307052011011001

Penguji IV,



Moh. Hatta, S.Ag, MHI.
NIP. 197110262007011012

Surabaya, 06 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fatwa Putri Ratningsih
NIM : C92215156
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : fatwapr@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BANK INDONESIA NO. 18/41/PBI/2016 TERHADAP PENCAIRAN BILYET GIRO MELALUI PERANTARA DI UD. ALFIAN JAYA DESA WEDORO KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Februari 2019

Penulis


Fatwa Putri Ratningsih

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat hal-hal yang berkenaan dengan rencana pelaksanaan penelitian. Hal-hal tersebut dituangkan dalam Sembilan sub bab, meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat teori Hukum Islam yang digunakan dalam pencairan bilyet giro melalui perantara, yakni menggunakan akad *hiwālah, bai'*, dan menjual piutang yang merupakan hasil telaah beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami dan menganalisis fenomena yang ada. Bab ini berisi teori-teori yang meliputi pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, klasifikasi, ketentuan berakhirnya *hiwālah*. Pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, jenis jual beliyang dilarang, dan menjual piutang. Serta ketentuan-ketentuan terkait transaksi pembayaran menggunakan bilyet giro yang termuat di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

Bab ketiga memuat tentang praktik pelaksanaan pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum UD. Alfian Jaya dan tahapan pelaksanaan pencairan bilyet giro melalui perantara dengan mengambil sample beberapa pengrajin yang melakukan pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya.

Bab keempat memuat pembahasan terkait analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro terhadap

B. Tampak Belakang

Bilyet Giro:

1. Tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dipindahtangankan.
2. Diterbitkan dalam mata uang Rupiah.
3. Tidak dapat ditarik tunai.
4. Hanya dapat ditagihkan ke Bank sejak Tanggal Efektif.
5. Wajib diisi lengkap sejak diterbitkan.
6. Tanggal Efektif harus berada dalam masa berlaku Bilyet Giro.
7. Masa berlaku Bilyet Giro 70 (tujuh puluh) hari sejak Tanggal Penarikan.
8. Tunduk pada ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
9. Maksimal 3 (tiga) kali koreksi.

Gambar 2.3 Bilyet Giro Tampak Belakang³⁵

Seluruh syarat formal yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro harus dipenuhi oleh bank tertarik secara lengkap saat pencetakan bilyet giro, sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, “Pemenuhan syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Bank Tertarik.”³⁶ Apabila bilyet giro tidak memenuhi Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, bilyet giro tersebut tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, ”Bilyet Giro yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku sebagai Bilyet Giro.”³⁷ Serta berakibat pada hapusnya kewajiban penyediaan dana oleh penarik sesuai Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/32/DPSP tanggal 29 November 2016 perihal Bilyet Giro.

³⁵ Lampiran II Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/32/DPSP tanggal 29 November 2016 perihal bilyet giro.

³⁶ Lihat Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

³⁷ Lihat Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

dilarang untuk dikirim melalui ekspedisi. Semua ekspedisi melarang terkait pengiriman dokumen bank maupun surat berharga melalui jasa ekspedisi.

Dalam larangan tersebut dijelaskan bahwa uang tunai atau surat-surat berharga (seperti cek, giro, efek, obligasi, saham, voucher, sertifikat, tiket pesawat, B/L, L/C, credit card, paspor, ijazah asli, dokumen tender, dokumen invoice, buku nikah asli, KTP, NPWP, STNK, BPKB asli dan surat berharga lainnya).¹ Hal ini dilarang karena beresiko kehilangan atau kerusakan dokumen saat proses pengiriman. Selain itu dokumen tersebut beresiko jatuh kepada pihak yang tidak berhak, sehingga berpotensi menyalahgunakan dokumen tersebut. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu pemesan memberikan bilyet giro dalam keadaan banyak kolom syarat formal yang harus diisi namun sengaja dikosongkan serta melanggar banyak ketentuan yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. Namun karena kurang pemahannya pengrajin sebagai penerima bilyet giro, mereka menerima bilyet giro yang diberikan pemesan tanpa ada keraguan serta penolakan. Meskipun ketentuan penggunaan bilyet giro sebagai alat transaksi pembayaran telah tercantum di sisi belakang bilyet giro, sebagian besar pengrajin tidak memahami yang termuat di sana.

¹ PT POS Indonesia, “Barang-Barang yang Dilarang Kirim Melalui Paket”, dalam <http://www.posindonesia.co.id/index.php/ingin-kirim-paket-lewat-pesawat-perhatikan-barang-barang-yang-dilarang-berikut/>, diakses pada 08 Januari 2019.

Sedangkan pada tahap kedua, pengrajin yang tengah membutuhkan dana guna memenuhi kebutuhan pembelian bahan baku untuk proses produksi maupun kebutuhan pribadi pengrajin yang mendesak menjadi faktor tingginya tingkat pencairan bilyet giro melalui perantara pencairan di UD. Alfian Jaya. Pengrajin memindahtangankan bilyet giro harus dalam keadaan kolom syarat formal belum terisi, keterangan tanggal pengunjukan serta nominal dana yang dipindahbukukan diutarakan secara langsung saat proses transaksi. Hal ini dikarenakan kolom syarat formal akan diisi oleh pihak UD. Alfian Jaya serta dibubuhi stempel sebagai identitas saat akan dicairkan. Proses pemindahtanganan bilyet giro tersebut dilakukan dengan cara jual beli, serta berlaku potongan 3% perbulan pada dana bilyet giro yang dicairkan. Meskipun dinilai membantu, namun hal ini dirasa cukup membebani pengrajin. Dan pengrajin harus rela tunduk terhadap ketentuan yang telah diberlakukan UD. Alfian Jaya.

B. Analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 terhadap Pencairan Bilyet Giro Melalui Perantara di UD. Alfian Jaya

1. Analisis Hukum Islam

Pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya terjadi pengalihan pembayaran piutang, dalam Islam hal ini disebut *hiwalah*. Dalam transaksi ini pengrajin bertindak sebagai *Muḥil* (orang yang berutang kepada pihak yang haknya dipindahkan), pemesan bertindak sebagai *Muḥāl ‘alaih* (penerima akad pemindahan utang), dan perantara

pencairan bertindak sebagai *Muḥāl* (orang yang menerima pemindahan hak). Yakni pemesan sebagai penarik bilyet giro melakukan pemindahbukuan sejumlah dana dari rekening penarik kepada rekening pengrajin sebagai penerima bilyet giro oleh bank tertarik. Namun setelah bilyet giro dicairkan melalui perantara pencairan, terjadi pengalihan pemindahbukuan dari pemesan sebagai penarik bilyet giro kepada pihak perantara pencairan sebagai penerima bilyet giro.

Pengrajin sebagai *Muḥil*, pemesan sebagai *Muḥāl ‘alaih*, dan perantara pencairan sebagai *Muḥāl* telah memenuhi syarat para pihak dalam akad *hiwalah*, meliputi:

1. orang yang memiliki kelayakan dan kompetensi untuk mengadakan akad yaitu ia adalah orang yang berakal dan baligh;
2. Ridha dan memberi persetujuan, atas kemauan sendiri serta tanpa ada paksaan.

Dalam transaksi pencairan bilyet giro melalui perantara relevan dengan Alquran Surat al-Baqarah [2]: 282 yang mengharuskan adanya pencatatan untuk menghindari lupa. Dalam transaksi ini bilyet giro merupakan surat perintah pemindahbukuan sebagai bukti pencatatan transaksi utang piutang. Selain itu dalam transaksi ini berlaku asas kepercayaan antara para pihak, yakni pemesan, pengrajin, dan perantara pencairan bilyet giro.

Transaksi pencairan bilyet giro melalui perantara termasuk dalam *hiwalah al-muqayyadah* (pemindahan bersyarat) yaitu pemindahan

sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua oleh pihak ketiga. Namun dalam transaksi ini bertentangan dengan prinsip hiwalah yang tidak boleh menimbulkan riba, karena dalam transaksi ini bilyet giro yang merupakan kewajiban pemindahbukuan sejumlah dana dipindahtanggankan dengan cara dijual dengan potongan yang mengandung unsur riba. Riba yang terkandung dalam transaksi ini adalah riba *fadhli*, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. karena terdapat potongan harga saat transaksi pertukaran.

Selain berlaku akad *hiwalah* dalam transaksi pencairan bilyet giro melalui perantara, berlaku pula akad *bai'* atau jual beli. Karena pengrajin memindahtanggankan bilyet giro kepada perantara pencairan dengan cara dijual. Pengrajin sebagai penjual (*bāi'*) dan perantara pencairan sebagai pembeli (*musytari'*) telah memenuhi syarat jual beli, yakni orang yang memiliki kelayakan dan kompetensi untuk mengadakan akad adalah orang yang berakal dan baligh. Namun transaksi ini bertentangan dengan syarat jual beli saling ridha, karena pengrajin sebagai penjual dalam keterpaksaan untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang mengharuskan dia menjual bilyet giro tersebut dengan potongan.

Dalam transaksi jual beli ini diperbolehkan sebagian ulama Syafi'i Karena secara zhahir, kreditor mampu menyerahkan barang tanpa ada halangan atau penolakan. Namun transaksi ini tidak relevan

dengan Alquran Surat al-Baqarah [2]: 275, karena dalam transaksi ini terkandung unsur riba. Dalam jual beli ini berlaku potongan jumlah dana yang dipindahbukukan dalam bilyet giro sehingga memberatkan penjual. Hal ini juga dilarang dalam pendapat Maliki karena mengakibatkan sebuah pelanggaran agama yakni riba. Dikuatkan dengan pendapat Hanafi, hal ini dilarang karena terdapat perbedaan jumlah harga sehingga tergolong jual beli *al-muzabanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding) serta mengandung riba yang haram.

Sehingga pencairan bilyet giro melalui perantara di UD. Alfian Jaya tergolong transaksi yang dilarang karena bertentangan dengan hukum Islam, di dalamnya terkandung unsur riba *fadhhl*, serta tergolong jual beli yang dilarang. Meskipun dinilai membantu permasalahan pengrajin yang membutuhkan dana mendesak, namun transaksi pencairan bilyet giro melalui perantara semakin membebani pengrajin.

2. Analisis Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro

Penggunaan bilyet giro sebagai alat transaksi pembayaran harus memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. Namun pencairan bilyet giro melalui perantara telah melanggar banyak ketentuan yang diatur dalam peraturan ini. Dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro membahas prinsip umum yang harus dipatuhi, yakni bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan. Hal ini dikarenakan bilyet giro

bukan termasuk surat berharga, namun merupakan warkat yang tidak dapat dipindahtangankan. Sehingga pemindahbukuan sejumlah dana hanya boleh dilakukan oleh bank tertarik kepada bank penerima tanpa adanya pihak ketiga sebagai perantara atau sejenisnya.

Bilyet giro yang diberikan pemesan kepada pengrajin tidak memenuhi syarat formal yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. Dalam pasal tersebut, terdapat sepuluh syarat formal yang harus dipenuhi saat pencetakan bilyet giro. Namun pada pelaksanaannya pengrajin menerima bilyet giro yang hanya terdapat tiga syarat formal yang diisi. Selain itu bilyet giro tersebut tidak memenuhi tenggang waktu pengunjukan atau pencairan yakni 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal penarikan atau pencetakan. Bahkan banyak bilyet giro yang diberikan memiliki waktu pengunjukan atau pencairan hingga 4 bulan sejak diberikannya bilyet giro tersebut oleh pemesan kepada pengerajin. Hal ini melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

Apabila bilyet giro tidak memenuhi Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, bilyet giro tersebut dinyatakan tidak berlaku dan kewajiban penyediaan dana oleh penarik menjadi hapus. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro dan Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/32/DPSP tanggal 29 November 2016

perihal Bilyet Giro. Selain berakibat terhadap tidak berlakunya bilyet giro, dapat berakibat Penolakan bilyet giro. Penolakan bilyet giro dijelaskan pada Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

Penolakan bilyet giro menimbulkan penahanan dan penundaan pembayaran bilyet giro yang diduga palsu atau isi bilyet giro diduga dimanipulasi, sesuai dengan angka V Surat Edaran Bank Indonesia No.18/32/DPSP perihal Bilyet Giro. Serta bagi pihak yang melanggar ketentuan, dapat dikenakan sanksi sesuai yang termuat dalam Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. Yakni bank tertarik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Sedangkan penarik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, dikenakan sanksi administratif sebagai penarik bilyet giro kosong.

- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, “Peran Sektor Industri dalam Mendorong Pertumbuhan Nasional”, dalam <http://www.kemenperin.go.id/artikel/5422/Peran-Sektor-Industri-dalam-Mendorong-Pertumbuhan-Nasional>, diakses pada 3 November 2018.
- Khalimah, Nur. “Peranan Bilyet Giro sebagai Alat Transaksi dalam Sistem Perdagangan Modern: Studi Analisis Hukum Islam”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 1996.
- Mājah, Ibn. *Kitab At-Tijārāt*, Bab *Bai’ al-Khiyār*, Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Nugroho, M. Agung. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Selisih Harga yang Terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang. Skripsi—UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.
- PT POS Indonesia, “Barang-Barang yang Dilarang Kirim Melalui Paket”, dalam <http://www.posindonesia.co.id/index.php/ingin-kirim-paket-lewat-pesawat-perhatikan-barang-barang-yang-dilarang-berikut/>, diakses pada 08 Januari 2019.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Riwiyanti, Filoni. “Perlindungan Hukum terhadap Penerima Bilyet giro Kosong berdasarkan SKBI No. 28/KEP/DIR/1995 tentang Bilyet Giro dan Peraturan No. 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro Bilyet Kosong”. Skripsi—Universitas Lampung, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 4* (Nor Hasanuddin). Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.18/32/DPSP tanggal 29 November 2016 perihal Bilyet Giro.
- Wahyuningtyas, Dini. “Tindak Pidana Penipuan Bilyet Giro (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”. Skripsi— Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam, (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.